



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR AHU-00218.50.10.2014**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM**  
**YAYASAN AL-IKHLAS SUMBER MULYO**

Menimbang : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris DEWI KARTINI BATUBARA, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 07 April 2014 yang dibuat oleh Notaris DEWI KARTINI BATUBARA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-IKHLAS SUMBER MULYO tanggal 16 April 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014041612100245 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;  
b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-IKHLAS SUMBER MULYO;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL-IKHLAS SUMBER MULYO  
berkedudukan di KABUPATEN LANGKAT sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 07 April 2014 yang dibuat oleh Notaris DEWI KARTINI BATUBARA, SH berkedudukan di KABUPATEN LANGKAT.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 April 2014.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



  
**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP : 19581120 198810 1 001**



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120402751616

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Yayasan AL IKHLAS SUMBER MULYO
2. Alamat Kantor	: DUSUN II SUMBER MULYO, Kel. Sumber Mulyo, Kec. Wampu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: -
No. Telepon	: 82360512226
Email	: tkalikhlas117@yahoo.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (null), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 11 Juli 2019  
Perubahan ke-1, tanggal: 29 November 2021

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 November 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik